

## **PENGARUH KELAS MENENGAH ATAU ELIT LOKAL WAJO YANG BERKUASA SETELAH PEMEKARAN WILAYAH DI SULEWESI SELATAN PADA TAHUN 2000**

**<sup>1</sup>Rizky Wahyu Putra, <sup>2</sup>Irawati, <sup>3</sup>Tamrin**

<sup>1,2,3</sup> Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

Email: rizkywahyuputra65@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini mendeskripsikan sebuah analisis implementasi kebijakan publik program Kartu Tani di Kota Padang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik politik di Kabupaten Wajo dalam teori permainan termasuk persaingan Zero Sum Game. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan data sekunder dan artikel-artikel yang disesuaikan dan terkait dengan penelitian. Konsep situasi persaingan Zero Sum Game ini setiap elit yang bersaing saling menjatuhkan dan berdiri sendiri antara yang satu dengan yang lain. Jika dikalkulasikan ke dalam penghitungan jumlah kemenangan kedua pihak sama dengan nol. Maksudnya, adalah bahwa kedua pihak dalam persaingan itu menghadapi kemungkinan hasil yang sama atau pasti. Jika pihak yang satu mendapatkan kemenangan, maka pihak yang lain yang kalah. Sebaliknya, jika pihak yang satu mendapatkan kekalahan, maka pihak yang lain yang menang. Artinya, dalam konflik ini salah satu pihak harus ada yang menang dan kalah untuk mengakhiri konflik tersebut. Dalam politik lokal situasi Zero Sum Game itu digambarkan elit lokal yang menang akan tetap berkuasa dan elit lokal lain yang kalah berakhir kepada kerugian dan kehilangan kekuasaan. Adapun yang terjadi dalam kasus Kabupaten Wajo ini elit lokal yang berpengaruh di Kabupaten Wajo, yakni Puang pasca reformasi kehilangan kekuasaan politiknya di Kabupaten Wajo tersebut. Berdasarkan temuan dan hasil penelitian, pada pemilu april 2004 Golkar kehilangan mayoritasnya di DPRD Wajo Hal ini dibuktikan dengan Golkar kehilangan 9 kursi dari 26 menjadi 17 kursi. Tantangan utama datang dari dua partai islam Indonesia yakni PAN dan PKS. PAN berhasil meraih 5 kursi dan PKS meraih 4 kursi.

**Kata Kunci: Reformasi; Desentralisasi; Dinasti Politik.**

### **Abstract**

This study describes an analysis of the implementation of the public policy program Kartu Tani in the city of Padang. The purpose of this research is to understand the political conflict in Wajo Regency through the lens of game theory, particularly focusing on the Zero-Sum Game competition. This research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques include the use of secondary data and articles that are relevant and aligned with the research topic. The concept of a Zero-Sum Game competition describes a situation in which competing elites aim to bring each other down and stand independently from one another. When calculated in terms of total outcomes, the combined gains and losses of both parties amount to zero. In other words, both parties in the competition face outcomes that are mutually exclusive and certain: if one party wins, the other must lose. Conversely, if one party loses, the other gains victory. This implies that in such conflicts, one side must emerge as the winner and the other as the loser to bring the conflict to an end. In the context of local politics, the Zero-Sum Game situation illustrates that victorious local elites retain power, while defeated elites suffer losses and lose their political influence. In the case of Wajo Regency, the influential local elite known as "Puang" lost their political power in the post-reform era. Based on the research findings, during the April 2004 general election, Golkar lost its majority in the Wajo Regional People's Representative Council (DPRD). This was evidenced by Golkar losing 9 seats, dropping from 26 to 17 seats. The main challenge came from two Islamic political parties in Indonesia: PAN and PKS. PAN won 5 seats, while PKS secured 4 seats..

## **PENDAHULUAN**

Pada masa orde baru kontrol pemerintah pusat terhadap daerah itu sangatlah kuat. politik sentralisasi yang ada pada masa orde baru itu dilakukan untuk menjaga kekuasaan presiden terhadap rakyat tetap kuat. Kemudian, politik sentralisasi pada masa orde baru juga digunakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan perekonomian di daerah. Salah satu cara pemerintah pusat melakukan kontrol terhadap daerah-daerah di Indonesia pada masa orde baru itu adalah melalui peranan partai politik sebagai alat rekrutmen politik. Partai politik yang dipimpin dan diketuai oleh presiden Soeharto pada masa orde baru itu, yaitu Golongan Berkarya (Golkar) menjadi alat politik untuk merekrut tokoh-tokoh masyarakat atau elit lokal yang berkuasa di daerah. Hal ini dilakukan pemerintah orde baru pada masa itu dalam upaya untuk mencegah terjadinya konflik politik dan menjaga kestabilan politik di Indonesia.

Para elit atau tokoh lokal yang berkuasa di daerah ini disarankan atau dipengaruhi oleh pemimpin yang berkuasa saat itu untuk bergabung

dengan partai politik tersebut jika ingin terpilih dan menang dalam pemilihan umum. Tujuannya, pemerintah bisa mengakomodir dan memenuhi semua kepentingan masyarakat yang ada di setiap daerah Indonesia tersebut. Karena para elit lokal dan tokoh masyarakatlah yang tahu dengan kepentingan masyarakat di daerah. Mereka semua juga tinggal disana dan sering berinteraksi dengan masyarakat yang hidup di daerah tersebut. Maka, dengan bergabung elit lokal dan tokoh masyarakat ke partai politik itu akan memudahkan pemerintah bisa menangkap aspirasi dan mengetahui kepentingan atau kebutuhan masyarakat yang masih belum dipenuhi oleh negara. Namun, hal ini juga telah meningkatkan kekuasaan presiden Soeharto terhadap rakyat menjadi semakin kuat.

Politik sentralisasi yang ada di masa orde baru itu dianggap merugikan oleh masyarakat karena beberapa daerah-daerah di Indonesia masih ada yang belum mendapatkan pembangunan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah

pusat pada masa orde baru ini hanya berfokus untuk membangun

Jakarta menjadi kota maju dikarenakan statusnya sebagai ibukota negara Indonesia. Pemerintah pusat berupaya membangun ibukota menjadi lebih maju dibandingkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk bisa menarik investor asing ke Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan karena Indonesia saat itu masih berstatus sebagai negara yang baru merdeka di asia tenggara. Sehingga, karena alasan itu pemerintah pusat fokus membangun Jakarta bertujuan untuk menunjukkan kepada negara- negara lain bahwa Indonesia pasca merdeka telah berkembang menjadi negara maju dan pembangunan ekonomi telah berjalan.

Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah-daerah lain di luar Jakarta untuk melakukan pembangunan dan penyelenggaraan perekonomian di daerah mereka masing-masing, Kewenangan ini diberikan pemerintah pusat dengan harapan mencapai pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Namun, Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tidak secara jelas mengatur penyelenggaran

pemerintah daerah dan pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah daerah.

Dalam Undang- Undang No. 5 tahun 1974 ini kewenangan pemerintah daerah kebanyakan dalam melaksanakan tugas pembantuan. Misalnya, pembangunan pasar dalam rangka untuk pelaksanaan tugas pembantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di daerah. Hal ini menunjukkan, politik desentralisasi belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat pada masa orde baru. Sehingga, setelah reformasi tahun 1999 itu pemerintah pusat menghapus undang-undang ini dan menggantinya dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dalam rangka memberikan kesempatan otonomi kepada daerah-daerah lain yang perekonomiannya masih tertinggal bisa maju dan sama dengan kota-kota atau daerah yang sudah berkembang di Indonesia.

Perbedaan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dengan undang- undang yang lama itu pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah tidak hanya kepada tugas pembantuan saja, tetapi juga kepada tugas atau urusan wajib pemerintah pusat kepada daerah. Selain itu, hal ini sebagai bentuk cara menghilangkan sentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada

daerah pada masa orde baru. Namun, undang-undang itu dalam beberapa hal juga memperlemah posisi pemerintah pusat sebagai pembuat keputusan untuk daerah. Sehingga, diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian memberikan sebuah keseimbangan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut.

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, Menurut Moleong, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Tipe penelitian kualitatifnya adalah Studi Kasus menurut A. Muri Yusuf dalam Yuli (2022) digunakan untuk memahami latar belakang suatu persoalan atau interaksi individu atau mengenai suatu

kelompok individu di dalam suatu unit sosial tertentu untuk memahami secara efektif bagaimana orang, kejadian, latar alami (social setting), peristiwa tertentu beroperasi atau berfungsi sesuai dengan konteksnya. Adapun yang digunakan dalam teknik pengumpulan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian biasanya adalah data yang didapatkan dari media, yaitu: artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan buku serta modul pembelajaran.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik desentralisasi yang dilakukan pemerintah pusat kepada daerah di Indonesia pasca reformasi tahun 1999 itu telah memberikan otonomi daerah kepada semua daerah yang ada di Indonesia. Hal ini juga telah memberikan pemerataan ekonomi yang menyeluruh kepada seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah-wilayah yang masih tertinggal semasa orde baru desentralisasi tidak hanya memberikan dampak positif kepada negara, tetapi juga memberikan masalah baru bagi pemerintah pusat. Salah satunya masalah mengenai perluasan kekuasaan dan terkonsentrasinya kekuasaan pemerintah kepada elit-elit lokal yang ada di daerah

telah menyebabkan meningkatnya kasus korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, politik desentralisasi telah meningkatkan pengeluaran pemerintah pusat dan mengurangi pemasukan kas keuangan negara.

Akibat politik desentralisasi dan otonomi daerah ini para elit lokal atau tokoh masyarakat yang sudah berkuasa di daerah menjadi semakin kuat. Namun, masalahnya pertanggungjawaban dan kejujuran elit lokal dalam melaksanakan pemerintahan daerah secara jujur dan berorientasi kepada kepentingan rakyat menjadi semakin menurun. Elit politik lokal yang berkuasa setelah adanya otonomi daerah dan politik desentralisasi itu menjadi semakin kaya. Bahkan, ada yang sampai menguasai aset-aset pemerintah yang ada di daerah.

Hal ini telah membuat korupsi, kolusi, di tingkat pusat saja, tetapi juga berkembang di tingkat lokal. Masyarakat yang menyadari hal itu telah memicunya terjadi konflik dan ketidakstabilan politik lokal di daerah. Penerapan politik desentralisasi yang terburu-buru ini terjadi karena trauma masa lalu dan mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan kepada presiden.

Kemudian, konflik politik lokal yang terjadi di Indonesia baik sebelum

otonomi maupun sesudah otonomi semua karena faktor yang sama yaitu tentang kepentingan. Para elit lokal yang kepentingannya tidak berhasil dipenuhi oleh pemerintah memobilisasi massa dengan unsur suku bangsa, agama dan ras untuk memaksa pemerintah memenuhi kepentingan mereka. Maka karena hal ini setelah reformasi tahun 1999 itu banyak terjadi konflik di beberapa daerah-daerah karena kekuasaan elit lokal yang sangat berkuasa di orde baru itu berkurang akibat politik desentralisasi tersebut. Hal ini menyebabkan konflik antara elit lokal yang berkuasa lama di orde baru harus bersaing dengan elit lokal yang baru muncul dari politik desentralisasi dan otonomi tersebut.

Menurut Teori Permainan Jhon Von Neumann dan Oskar Morgenstern persaingan elit politik itu selalu berakhir dengan kemenangan dan kekalahan. Namun, untuk bisa mengetahuinya itu perilaku persaingan itu dalam teori ini dibagi menjadi dua, yaitu Zero Sum Game (Non-Kooperatif) dan Non Zero Sum Game (Kooperatif).

Teori Persaingan permainan oleh ilmuwan politik digunakan untuk merumuskan situasi persaingan politik para elit dalam mendapatkan kekuasaan dan menganalisis strategi yang digunakan

elit politik melalui pengambilan keputusan mereka. Strategi puang disini dalam memelihara kekuasaannya di Wajo melalui penempatan kekuasaan pemerintahan kepada elit atau pengusaha yang memiliki hubungan kerjasama atau teman bisnis. Kabupaten Wajo sebagai salah satu wilayah mengalami pemekaran wilayah setelah reformasi khususnya pada tahun 2000 itu menyebabkan elit yang berkuasa di Wajo atau puang melemah. Puang, istilah untuk orang bugis yang memiliki keturunan atau darah bangsawan menjadi tokoh penting dalam mengembalikan dinasti solid yang pernah berkuasa sebelumnya di Wajo pada tahun 1980-an.

Namun, setelah tahun 2000 bangsawan Wajo, yaitu bernama Puang bertahun-tahun telah menguasai aset strategi daerah yang ada di Wajo dan memiliki relasi kekuasaan yang besar dengan birokrasi yang ada di Wajo itu setelah reformasi tahun 1999 dan pemekaran wilayah tahun 2000 menjadi 14 kecamatan. dia mulai kehilangan kekuatan politiknya secara perlahan-lahan oleh orang-orang pemerintah yang bukan asli wajo sebagai akibat politik desentralisasi tersebut. Puang menggalang kontak yang dekat dengan

pengusaha. Pengusaha di Sengkang, menjalin hubungan dengan Golkar dan memberikan donasi regular. Puang memberikan proyek strategis di Wajo dengan memberikan kontrak kepada pengusaha kaya, anggota DPRD dari Golkar serta seluruh penyandang dana Golkar agar proyek-proyek tersebut menguntungkan Puang dan kroni-kroninya.

Pasca reformasi, kebebasan pers telah menyoroti bagaimana puang telah menguasai dan memelihara wajo dengan baik membuat masyarakat mulai terjadi di Wajo. Media tulis atau koran- koran seperti Pedoman Rakyat, Fajar, Parepare Pos, dan Palopo Pos sering menerbitkan artikel-artikel kritis terhadap pemerintah, namun wartawan juga telah didekati dan disogok oleh wakil-wakil pemerintah agar tidak menerbitkan cerita-cerita kritis serta untuk memastikan kekuasaan mereka tetap bertahan disana. Selain itu, reformasi tahun 1999 juga membuat Golkar kehilangan mayoritasnya di DPRD Wajo selama pemilu april 2004 dalam perebutan parlemen daerah. Hal ini dibuktikan dengan Golkar kehilangan 9 kursi dari 26 menjadi 17 kursi.

Tantangan utama datang dari dua partai islam Indonesia yakni PAN dan PKS. PAN berhasil meraih 5 kursi dan PKS meraih 4 kursi. Perubahan tersebut mengisyaratkan bahwa puang telah kehilangan dominasinya di DPRD melaksanakan pemilu yang bersih dan diikuti oleh banyak partai itu membuat keluarga bangsawa Wajo ini semakin susah untuk mempertahankan kuasaannya. Maka kasus yang terjadi di Wajo itu dalam teori permainan ini digambarkan sebagai situasi Zero Sum karenekehilangan kekuasaannya di legislatif.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan diatas itu, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini menjelaskan bahwa politik desentralisasi atau otonomi daerah yang dilaksanakan setelah reformasi tahun 1999 itu pada awalnya menimbulkan berbagai permasalahan atau konflik di tingkat lokal. Konflik politik itu ada yang berakhir dengan kemenangan dan kekalahan atau dalam teori permainan disebut Zero Sum Game. Konflik politik yang terjadi di Wajo Sulawesi Selatan itu sebagai konflik Zero Sum Game karena Puang yang merupakan elit politik yang sudah lama berkuasa di Wajo setelah reformasi dan pemilu tahun 2004

berakhir kalah karena partai politiknya yang juga kekuatan politiknya telah kehilangan kekuasaannya di legislatif.

#### **REFENSI**

- Andi Azikin. 2019. "Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi". Jurnal Ilmu Manajemen Pemerintahan. Universitas Paramitha.
- Husin Ilyas. 2012. "Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah". Jurnal Pemerintahan Universitas Muaro Bango Jambi.
- Henk Schulte Nordholt, Gerry van Klinken. 2014. "Politik lokal di Indonesia". Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- James D. Morrow. 1994. "Teori Permainan untuk Ilmuwan Politik". New Jersey: Priceton University.